

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pandemi covid-19 memberikan dampak terhadap sejumlah sektor di dunia. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah sektor ekonomi. Berdasarkan informasi yang didapat dari laman wataekonomi.co.id (diakses pada 19 Oktober 2020 pukul 20:11), “IMF (*International Monetary Fund*) mencatat bahwa pandemi covid-19 telah menyebabkan kerugian perekonomian global sebesar 12 triliun dolar AS atau sekitar 168.000 triliun rupiah”. Terganggunya ekonomi dunia tersebut tentunya mempengaruhi ekonomi Indonesia. Seperti yang dikemukakan Fahmi (2013: 293), bahwa Indonesia dengan tingkat ketergantungan ekonomi domestic pada impor telah memposisikan kondisi perekonomian Indonesia secara structural cukup rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi global.

Dampak pandemi covid-19 terhadap ekonomi Indonesia membuat Indonesia mengalami penurunan terhadap aktivitas dan kinerja ekonomi. Berdasarkan laman djpb.kemenkeu.go.id (diakses pada 18 Januari 2021),

“Ekonomi bergerak karena ada 2 kekuatan, permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*). Konsumsi dan produksi. Namun, pandemi covid-19 cukup memukul keras ekonomi Indonesia pada 2 sisi itu. Pembatasan sosial telah berdampak pada berhentinya aktivitas ekonomi dan turunnya kinerja ekonomi”.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa selain dari pengaruh ekonomi global, faktor lain yang menyebabkan menurunnya ekonomi Indonesia juga dipengaruhi oleh pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Mendukung pernyataan tersebut, Iskandar sebagaimana dikutip dalam Yamali dan Putri (2020: 386), berpendapat bahwa *Social atau physical distancing* ini membawa pengaruh pada penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan.

Pandemi covid-19 memberikan dampak serius terhadap perekonomian Indonesia. Hal tersebut terjadi tidak hanya dari dampak kesehatan hingga kematian akibat covid-19 dan terganggunya ekonomi global, tetapi juga dipengaruhi oleh kebijakan yang dibuat untuk mengurangi penyebaran covid-19. Menurunnya ekonomi di Indonesia yang terjadi akibat pandemi covid-19 memaksa Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menangani permasalahan tersebut.

Sebagai upaya Pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi tersebut, Pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tertuang Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka

Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, Pasal 1(1),

“Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi *Corona Viruus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional”.

Dalam rangka mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tersebut, Pemerintah memanfaatkan Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Industri Kecil dan Menengah (KITE-IKM) yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2016 jo 110/PMK.04/2019. Fasilitas KITE-IKM merupakan sebuah fasilitas dimana Industri Kecil dan Menengah (IKM) diberikan fasilitas kemudahan impor dengan bentuk pembebasan bea masuk dengan tujuan ekspor.

Hasil penelitian Balassa (1978) dan Kavoussi (1984) sebagaimana dikutip oleh Ginting (2017: 2), mengemukakan bahwa peningkatan ekspor memberikan kontribusi yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Sejalan dengan pernyataan tersebut, hasil penelitian Ginting (2017: 16), menyatakan bahwa untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi maka dibutuhkan peningkatan kinerja ekspor Indonesia.

Melihat peluang ekspor dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, Pemerintah memberikan fokus terhadap kemudahan ekspor-impor untuk pemulihan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi covid-19. Sebagai bentuk upaya pemulihan ekonomi tersebut, Pemerintah memanfaatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Industri Kecil dan Menengah (KITE-IKM) sebagai upaya mendorong pemulihan ekonomi yang terdampak akibat pandemi covid-19.

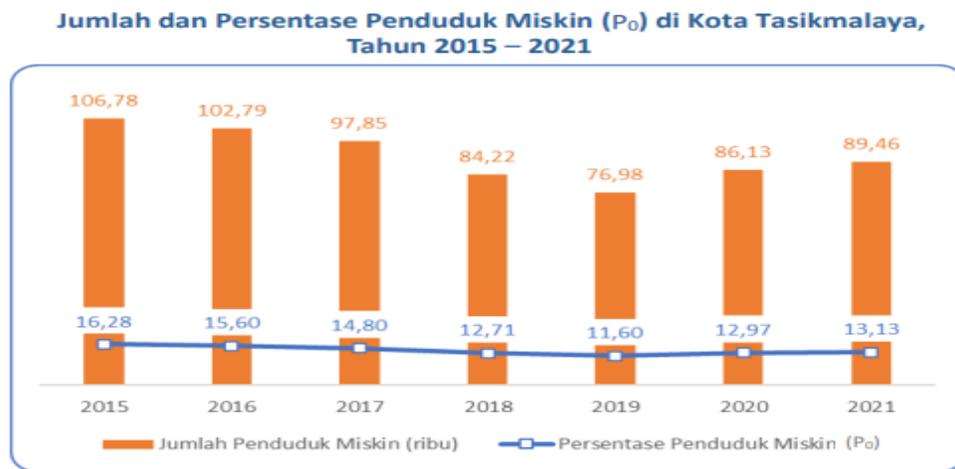
Seperti yang dikutip dari laman beacukai.go.id (diakses pada 16 September 2021 pukul 18:35), Hermansjah menyatakan "... Dengan kemudahan impor dan bahan baku ini, kami harap kegiatan ekspor hasil produksi perusahaan akan meningkat. Hasilnya perusahaan dapat lebih berkembang, devisa Negara pun bertambah". Pemerintah meyakini bahwa kemudahan dalam aktivitas ekspor-impor dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian di Indonesia.

Dalam hal peningkatan ekspor-impor sebagai upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi, Pemerintah memberikan perhatian besar pada IKM.

Selain karena jumlah IKM yang mendominasi diantara Industri lainnya, IKM juga mampu membuka lapangan pekerjaan. Menanggapi hal tersebut, Sekertaris Jenderal Kemenperin, Dody Widodo sebagaimana dikutip dari laman kemenperin.go.id (diakses pada 04 September 2021), mengatakan “Capaian tersebut merupakan potensi besar bagi IKM dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat dampak pandemi Covid-19”. Maka dari itu, Pemerintah menaruh harapan besar pada perkembangan IKM melalui Fasilitas KITE-IKM.

Fasilitas KITE-IKM gencar disosialisasikan di berbagai daerah di Indonesia. Kota Tasikmalaya merupakan salah satu daerah yang merasakan dampak dari pandemi covid-19. Zen dikutip dari laman maritim.go.id (diakses pada 23 Desember 2021), menyatakan “Terlebih berdasarkan data Bank Indonesia, Tasikmalaya mengalami keterlambatan perekonomian selama Pandemi Covid-19”. Selain pernyataan tersebut, memburuknya kondisi ekonomi Kota Tasikmalaya akibat pandemi juga dapat terlihat dari persentase penduduk miskin. Pada tahun 2020 Kota Tasikmalaya mengalami peningkatan hingga 1,37%, dan pada tahun 2021 kembali meningkat sebesar 0,16%.

Grafik 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Tasikmalaya Tahun 2015-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik

Angka kemiskinan merupakan salah satu indikator dari pertumbuhan ekonomi. Jika dilihat dari grafik di atas, angka kemiskinan di Kota Tasikmalaya mengalami peningkatan di tahun 2020 dan 2021. Hal tersebut menarik perhatian karena di tahun-tahun sebelumnya angka kemiskinan di Kota Tasikmalaya berhasil mengalami penurunan. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa pandemi covid-19 memberikan dampak yang cukup besar dan memaksa Pemerintah untuk melakukan berbagai upaya dalam pemulihannya.

Fasilitas KITE-IKM yang telah dikeluarkan Pemerintah pusat yaitu Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jendral Bea dan Cukai, dapat menjadi peluang bagi Pemerintah daerah Kota Tasikmalaya dalam memulihkan sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota

Tasikmalaya. Tentunya dengan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti Bea Cukai Tasikmalaya.

Jumlah IKM di Kota Tasikmalaya mencapai angka 4.450 di tahun 2021.

Tabel 1. Rekapitulasi Perkembangan Potensi Industri Kota Tasikmalaya Tahun 2018-2021

NO	KOMODITI INDUSTRI	UNIT USAHA (UU)			
		2018	2019	2020	2021
A. KOMODITI UNGGULAN :					
1	Bordir	1.407	1.417	1.423	1.423
2	Kerajinan Mendong	174	174	174	174
3	Kerajinan Bambu	75	75	75	75
4	Alas Kaki (Kelom Geulis, Sandal, Sepatu)	536	543	545	570
5	Kayu Olahan (Meubel)	217	224	226	226
6	Batik	41	43	43	43
7	Payung Geulis	8	8	8	8
8	Makanan Olahan	656	764	814	1.066
JUMLAH		3.114	3.248	3.308	3.585
B. KOMODITI LAINNYA :					
1	Bahan Bangunan	323	324	326	326
2	Pakaian Jadi	172	231	236	337
3	Percetakan	55	56	58	58
4	Lain-lain	130	136	141	144
JUMLAH		680	747	761	865
TOTAL		3.794	3.995	4.069	4.450

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya

Dari keseluruhan jumlah IKM di Kota Tasikmalaya hanya 6 IKM yang sudah mendapat fasilitas KITE-IKM. 6 IKM tersebut terdiri dari :

- 1) PT. Tjiwulan Putra Mandiri;
- 2) PT. Goenoeng Poetri Lestari;
- 3) Dawalul Bordir;
- 4) PT. Albasi Layung Indonesia;

- 5) Alantasik;
- 6) dan PT. Butik Ustazah Indonesia.

Berdasarkan informasi yang didapat dari Didin Samsudin selaku Staf Khusus di Bea Cukai Tasikmalaya, terdapat 6 IKM di Kota Tasikmalaya yang telah mendapat fasilitas KITE-IKM. Dua diantaranya telah mendapatkan fasilitas tersebut sebelum adanya pandemi covid-19. Sisanya mendapatkan fasilitas KITE-IKM setelah adanya pandemi covid-19. Namun, hanya 2 IKM yang aktif memanfaatkan Fasilitas KITE-IKM. Salah satunya yaitu PT. Tjiwulan Putra Mandiri.

PT. Tjiwulan Putra Mandiri merupakan salah satu industri berskala menengah di Kota Tasikmalaya yang telah mendapatkan fasilitas KITE-IKM pada tahun 2017 lalu. Dengan memanfaatkan fasilitas KITE-IKM, PT. Tjiwulan Putra Mandiri merasakan manfaatnya dimana fasilitas tersebut memangkas biaya produksi, biaya material, dan pembayaran pajak. Berdasarkan data yang didapat dari kwbcjatim1.beacukai.go.id, sebelum mendapatkan fasilitas KITE-IKM PT. Tjiwulan Putra Mandiri mengeluarkan sebanyak Rp. 450,000,000/FCL yang mana meliputi biaya bea masuk, PPN impor, PPh Impor dan biaya trucking. Setelah mendapatkan fasilitas KITE-IKM perusahaan hanya mengeluarkan Rp. 40.000.000/FCL untuk membayar PPh Impor dan biaya trucking. Dengan itu perusahaan memperoleh efisiensi sebesar Rp. 410.000.000 atau sekitar 91%, sehingga menurunkan harga jual yang meningkatkan daya saing di pasar luar negeri, meningkatkan

kesejahteraan karyawan, dan meningkatkan kontribusi untuk yayasan atau pesantren di sekitarnya.

Sebagai salah satu industri di Kota Tasikmalaya yang telah mendapat fasilitas KITE-IKM, PT. Tjiwulan Putra Mandiri telah berhasil bersaing di pasar internasional. Mengutip dari laman kwbcjabar.beacukai.go.id,

“Busana muslim dengan merk Al Noor produksi PT Tjiwulan Putra Mandiri hingga saat ini berhasil menembus pasar Saudi Arabia, Algeria, Afrika Selatan, Malaysia, hingga Amerika Serikat. Kesuksesan PT Tjiwulan ini tidak terlepas dari peran KPPBC TMP C Tasikmalaya yang mendorong PT Tjiwulan untuk memanfaatkan fasilitas KITE IKM serta memberikan pendampingan dan juga asistensi akan hal teknis terkait”.

Pernyataan tersebut menunjukkan kesuksesan PT.Tjiwulan Putra Mandiri dalam ekspor-impor dengan menggunakan Fasilitas KITE-IKM. Walau sempat terhenti akibat pandemi, kini aktivitas ekspor IKM tersebut kembali berjalan. PT. Tjiwulan Putra Mandiri diharapkan dapat menjadi contoh *success story* dari pengguna fasilitas KITE-IKM. Dalam laman fdokumen.com (diakses pada 19 Oktober 2021), PT.Tjiwulan Putra Mandiri diperkenalkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai salah satu *success story* dari pengguna fasilitas KITE-IKM.

Upaya Bea Cukai dalam memanfaatkan fasilitas KITE-IKM sebagai pendorong pemulihan ekonomi tersebut sejalan dengan program Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam pemulihan ekonomi khususnya di Tasikmalaya. hal tersebut disampaikan oleh Kuswa Wardana (Ketua Gugus Tugas PEN Kota

Tasikmalaya) dalam beacukai.go.id (diakses pada 27 Agustus 2021 pukul 18:13),

“Pemerintah Kota Tasikmalaya sangat menyambut baik tujuan Bea Cukai Tasikmalaya dalam peningkatan ekspor produk-produk UMKM. Hal tersebut juga sejalan dengan program dari Pemerintah Kota dalam pemulihan ekonomi khususnya di Kota Tasikmalaya ini. Atas nama Pemerintah Kota Tasikmalaya, kami siap memberikan dukungan penuh dan berkolaborasi dengan Bea Cukai Tasikmalaya untuk mewujudkan peningkatan ekspor produk UMKM tersebut”.

Fasilitas KITE-IKM memiliki potensi untuk dapat mempercepat pemulihan ekonomi, mengingat kontribusi yang diberikan seperti dorongan untuk melakukan ekspor dan membuka lapangan kerja. Dengan itu, dapat membantu program pemerintah dalam pemulihan ekonomi akibat pandemi. Berdasarkan latar belakang di atas penyusun ingin mengetahui bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya dalam memanfaatkan program KITE-IKM di masa pandemi covid-19 dengan studi komprehensif di PT.Tjiwulan Putra Mandiri.

1.2.Rumusan Masalah

Kebijakan dapat menjadi solusi bagi permasalahan yang dianggap urgen. Begitupun dengan pemanfaatan fasilitas KITE-IKM sebagai upaya pendorong program pemulihan ekonomi nasional. Berdasarkan pemaparan pada latar belakang, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu Bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya dalam pemanfaatan fasilitas KITE-IKM di masa pandemi covid-19?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya dalam pemanfaatan fasilitas KITE-IKM di masa pandemi covid-19 sebagai upaya pemulihan ekonomi.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan,

- a. Dapat bermanfaat khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai sumber bacaan atau referensi yang dapat memberikan informasi teoritis terhadap penelitian serupa.
- b. Memberikan wawasan terkait kebijakan pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya dalam pemanfaatan fasilitas KITE-IKM di masa pandemi covid-19 sebagai upaya untuk mendorong pemulihan ekonomi.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat yang bersifat praktis dari hasil penelitian diharapkan,

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai kebijakan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya dalam pemulihan ekonomi di masa pandemi covid-19.

- b. Bagi instansi terkait, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah terkait upaya pemulihan ekonomi di Kota Tasikmalaya khususnya dalam sektor ekspor-impor.
- c. Bagi masyarakat umumnya dan para pelaku ekspor-impor khususnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait Fasilitas seperti kemudahan yang diberikan pemerintah bagi para pelaku usaha ekspor-impors.